Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 5, No. 2, Mei 2026, pp. 73-87
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i2.823

Collaborative Governance Dalam *Zero New* Stunting di Kecamatan Rancasari Kota Bandung

Alnofika Dewi Sulastri[1], Yayan Andri[2], Ramaditya Rahardian[3], Latifah[4]
Email: alnofikad@gmail.com, yayan.andri@umbandung.ac.id, latifah@umbandung.ac.id, ramaditya.rahardian@umbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada, tingginya jumlah balita yang berisiko stunting di Kecamatan Rancasari yang mencapai 36,23% atau 407 balita dari 1.123 balita pada tahun 2024. Hal tersebut membuat pemerintah Kota Bandung berupaya menekan angka stunting serta menanggulanginya. Pemerintah juga menargetkan Jabar *Zero New* Stunting pada tahun 2025. Maka dari itu, Pemerintah mempunyai peran dan posisi strategis untuk melakukan penanganan kasus stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative Governance* Dalam Jabar *Zero New* Stunting Di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008) yang mencakup lima indikator utama : *Face to face dialog, trust building, commitment to process*, *share understanding* dan *intermediate outcome*s. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, adapun data sekunder dari berupa jurnal, berita, data statistik dan laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukan bahwa *collaborative governance* dalam Jabar *Zero New* Stunting di Kecamatan Rancasari Kota Bandung dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keberlanjutan kerjasama dengan mitra swasta dan LSM dan ketimpangan kapasitas dalam penyamaan persepsi.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Jabar Zero New Stunting, Kecamatan Rancasari, Stunting

Abstract

This research is based on the high number of toddlers at risk of stunting in Rancasari District which reached 36.23% of 407 toddlers out of 1,123 toddlers in 2024. This makes the Bandung City government try to reduce the stunting rate and overcome it. The government is also targeting West Java Zero New Stunting by 2025. Therefore, the Government has a role and strategic position to handle stunting cases. This study aims to analyze Collaborative Governance in West Java Zero New Stunting in Rancasari District, Bandung City. This study uses a qualitative approach by referring to the theory of collaborative governance according to Ansell & Gash (2008) which includes five main indicators: Face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding and intermediate outcomes. The data sources in this study consist of primary data obtained from observations and interviews with various related parties, while secondary data from documentation. The data collection technique from this study was carried out through field observation, in-depth interviews and documentation studies. The results of the study show that collaborative governance in West Java Zero New Stunting in Rancasari District, Bandung City, can be said to have run well, but there are still several obstacles such as limited human resources, lack of sustainability of cooperation with private partners and NGOs, and capacity inequality in equalizing perceptions.

Keywords: *Collaborative Governance, Jabar Zero New Stunting, Kecamatan Rancasari, Stunting*

[1,2,3,4] Universitas Muhammadiyah Bandung

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 5, No. 2, Mei 2026, pp. 73-87
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i2.823

Pendahuluan

Permasalahan stunting masih menjadi isu global yang mendesak karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Stunting adalah gangguan tumbuh yang terjadi pada anak balita karena kekurangan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan pada bayi.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN 2024) stunting di Indonesia turun dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Sedangkan, standar WHO mengenai prevalensi stunting harus berada dibawah angka 20 persen. Maka dari itu, stunting masih menjadi permasalahan kesehatan nasional serius yang harus segera diperbaiki dan ditanggulangi agar mengalami penurunan sesuai dengan anjuran WHO.

Dikutip dari situs UNICEF stunting dapat disebabkan dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Pola makan dan gaya hidup, kurangnya mengkonsumsi makanan segar, berlebihan mengkonsumsi produk olahan, terlalu banyak mengkonsumsi garam, gula, karbohidrat dan makan makanan yang berlemak.
2. ASI, sangat berperan penting dalam pemenuhan gizi pada bayi.
3. Pendidikan kesehatan rendah, yang menghambat pemahaman tentang tumbuh kembang anak.
4. Faktor sosial-ekonomi, termasuk etika sosial, sanitasi buruk, lingkungan pemukiman, kemiskinan, ekonomi.

Dampak stunting dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan karena risiko infeksi berulang, kesulitan belajar, penurunan kinerja akademik, dan penurunan produktivitas nasional. Berbeda dengan anak yang gizinya terpenuhi sebelum berumur 3 tahun memiliki kondisi fisik dan pencapaian akademik yang baik. Maka dari itu, penanggulangan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor tidak hanya intervensi kesehatan. Stein (2008).

Untuk menangani stunting yang kompleks, pendekatan kolaboratif antaraktor diperlukan. Pendekatan ini dikenal sebagai pemerintahan kolaboratif. *Collaborative governance* diartikan sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan yang secara

langsung melibatkan kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik. (Ansell & Gash, 2008).

Ansell & Gash, (2008) menyampaikan bahwa terdapat lima indikator dalam proses kolaboratif yaitu :

1. Dialog Tatap Muka (*face to face dialogue*), berarti dalam hal ini menjadi bagian inti terjadi proses kolaborasi, yang digunakan untuk membangun kepercayaan dalam pemecahan hambatan dan perbedaan pandangan dalam proses kolaborasi.
2. Kepercayaan (*trust building*), berarti dalam proses kolaborasi perlu adanya kepercayaan, hal ini diupayakan untuk mengantisipasi adanya risiko manipulatif dalam proses kolaborasi.
3. Komitmen (*commitment to process)*, berkaitan dengan tanggung jawab pada semua yang terlibat dalam proses kolaborasi.
4. Pemahaman Bersama *(shared understanding*), berkaitan dengan membangun arah jelas dan strategis, tujuan yang sama, visi dan misi yang sama untuk mencapai kesepakatan.
5. Dampak (*Intermediate Outcomes*), berarti keputusan belum final dari hasil kolaborasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Jabar *Zero New* Stunting sebagai upaya mengatasi stunting. Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah kasus baru melalui intervensi multisektor dari hulu (pranikah, seperti pendidikan remaja putri) ke hilir (pasca-kelahiran, seperti pemantauan balita), serta mewujudkan generasi muda Jawa Barat yang sehat, unggul, dan bebas stunting. Ini akan dicapai melalui intervensi yang multisektor, terintegrasi dari hulu ke hilir, dan kolaboratif. (Fitriani, 2023)

Berdasarkan program Jabar *Zero New* Stunting, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mencegah adanya kasus stunting baru dengan pendekatan kolaboratif. Program ini menekankan partisipasi berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam upaya mencegah stunting dari masa pranikah hingga pasca kelahiran. Tujuan dari program ini yaitu menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Keberhasilan program

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 5, No. 2, Mei 2026, pp. 73-87
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i2.823

bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Untuk membantu kelompok yang berisiko stunting secara langsung, orang tua balita, remaja putri, ibu hamil, calon pengantin, kader PKK, dan perangkat desa.

Situasi di Kota Bandung, prevalensi stunting mencapai 22,8% pada tahun 2024, namun belum mencapai target 20,54% pada tahun 2025. Dengan adanya beberapa kebijakan yaitu, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.952 – BAPPELITBANG/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.549-DPPKB/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Se-kota Bandung Tahun 2022. Maka dari itu, upaya penanggulangan stunting perlu terus dimaksimalkan, hingga kini berbagai program telah digalakkan Pemerintah Kota Bandung untuk terus menekan angka stunting. Namun, saat ini belum ada peraturan atau regulasi yang mengatur program Jabar *Zero New* Stunting secara khusus. Pedoman atau aturan tertinggi yang berlaku hanya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Hal ini mempengaruhi pemahaman mengenai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program tersebut. Koordinasi yang dilakukan masih kurang optimal, terlihat dari ketidakselarasan antar instansi yang terlibat. (Daerah et al., 2024)

Grafik 1.2 Prevalensi stunting Kota Bandung



Sumber : Dinas KesehatanKota Bandung 2024

Pada tahun 2024, Kecamatan Rancasari mencatatkan 36,23% stunting, atau 407 balita dari 1.123 balita, jika dihitung berdasarkan kewilayahan. Secara rinci, angka prevalensi stunting per kelurahan adalah sebagai berikut, Kelurahan Cipamokolan

mencapai 7,83% dari populasi, yang berarti sekitar 77 balita. Kelurahan Manjahlega adalah 7,68%, atau sekitar 63 balita, Kelurahan Derwati memiliki 136 balita, atau 14,17% dari total, Kelurahan Mekar Jaya memiliki porsi terbesar, 15,18%, atau sekitar 131 balita. Tantangan utama dalam pelaksanaan program Jabar *Zero New* Stunting di Kecamatan Rancasari meliputi:

1. Kurangnya pendidikan kesehatan mengenai stunting yang menyebabkan masyarakat tidak memahami risiko dan pencegahan stunting.
2. Gaya hidup yang tidak sehat termasuk paparan asap rokok (70,70% penduduk merokok, yang berdampak pada kualitas udara anak-anak), sanitasi yang buruk (seperti mencuci makanan di dekat toilet dan kurangnya kebiasaan mencuci tangan sebelum makan), dan kurangnya sumber air bersih.
3. Masalah kesehatan tertentu, seperti kekurangan energi kronis pada ibu hamil yang membutuhkan tambahan protein, bayi lahir dengan berat badan rendah atau prematur dan panjang badan dibawah 45 cm, serta anak yang tidak mengalami peningkatan berat badan meskipun sudah mendapat pengobatan.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal Ibu Anna, Ketua TP-PKK Pokja IV yang dihadiri oleh TPPS, puskesmas dan kader Kecamatan Rancasari pada acara edukasi dan pembagian PMT, masyarakat sering mengabaikan (kurang sadar) risiko stunting, dengan masalah seperti riwayat penyakit bawaan pada ibu hamil yang meningkatkan risiko kekurangan nutrisi janin. Data terbaru menunjukkan bahwa ada empat kasus stunting aktif dan dua kasus tuberkulosis (TB), menunjukkan bahwa program kesehatan harus diintegrasikan dengan program stunting.

Meskipun Program *Zero New* Stunting telah dimulai di Kecamatan Rancasari, praktik kerja sama pemerintahan belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dialog tatap muka, kepercayaan bersama, komitmen terhadap tujuan kolektif, dan akuntabilitas bersama adalah beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antar aktor, menurut model pemerintahan kolaboratif yang dikembangkan oleh Ansell & Gash, (2008). Namun, berdasarkan data sekunder dan observasi awal, sebagian besar upaya penanganan stunting di wilayah ini masih cenderung dilakukan secara sektoral, dengan koordinasi administratif, dan belum ada komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 5, No. 2, Mei 2026, pp. 73-87
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i2.823

Partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting, terutama keluarga berisiko, kader posyandu, dan tokoh masyarakat, hanya bersifat simbolis atau formalitas dan belum menunjukkan partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, tidak ada sistem komunikasi dan pemantauan yang konsisten yang mendukung forum lintas sektor seperti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Oleh karena itu, praktik di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *trust-building* yang menjadi dasar dari *collaborative governance.*

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Puskesmas (Puskesmas Cipamokolan dan Puskesmas Derwati), Cita Sehat Foundation, Kader TPK Kecamatan Rancasari.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari (Creswell, 2023) yaitu Purposeful Sampling. Teknik Purposeful sampling digunakan karena informan yang telah ditentukan dianggap memahami objek penelitian dan diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang digunakan dalam penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Tim Kerja Kesehatan & Gizi Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan Kota Bandung), Sub. Koordinator Pendayagunaan Penyuluh Stunting Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Ketua TPPS Kecamatan Rancasari, UPTD Puskesmas (Kepala Puskesmas Rancasari, Bagian Gizi Puskesmas Cipamokolan, Bagian Gizi Puskesmas Derwati), Development Cita Sehat Foundation (Cita Sehat Foundation), Kader Posyandu.

Pada penelitian kualitatif ini data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara pada pihak informan melalui pengamatan dan tanya jawab. Sedangkan, Data sekunder didapatkan secara tidak langsung, melalui jurnal, berita, data statistik dan laporan tahunan. Teknik pengumpulan data menjadi bagian penelitian yang sangat penting. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 5, No. 2, Mei 2026, pp. 73-87
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i2.823

Hasil dan Pembahasan

1. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Dalam mencapai Jabar *Zero New* Stunting, program yang telah dilaksanakan sejak 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tim Percepatan Penurunan Stunting dibentuk dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Forum tatap muka yang dilaksanakan rutin setiap bulannya memberikan kesempatan kepada setiap aktor untuk menyuarakan pendapat dan mempersatukan sudut pandang mengenai penanganan stunting. Kecamatan bersama jajaran membantu koordinasi antar kelurahan, menanggung pelaksanaan program, dan mendorong perangkat kewilayahan untuk berpartisipasi aktif. Karena tantangan utama kolaborasi terletak pada bagaimana berbagai aktor menyamakan visi bersama, kecamatan juga menekankan pentingnya menyatukan persepsi antar pihak.

Dua forum utama Loka Karya Mini dan Rembuk Stunting digunakan sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting di tingkat kecamatan. Rembuk Stunting diselenggarakan oleh Puskesmas yang melibatkan anggota kelurahan, kader TPK, dan tokoh masyarakat. Forum bulanan dan triwulanan diadakan secara teratur yang lebih menekankan masalah teknis seperti pemetaan balita berisiko, evaluasi hasil posyandu, intervensi kesehatan lingkungan dan gizi. Loka Karya Mini dilaksanakan pada skala yang lebih besar dengan dukungan dari pemerintah kecamatan atau daerah. Fokus utamanya adalah membuat strategi, menetapkan tujuan penurunan stunting, membagi tanggung jawab, dan berkolaborasi lintas sektor. Dengan ciri-ciri ini, Loka Karya Mini berfungsi sebagai wadah untuk mengarahkan kebijakan dan mengumpulkan komitmen bersama untuk program Jabar *Zero New* Stunting.

2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Keberhasilan kolaborasi antar-aktor bergantung pada aspek membangun kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui interaksi yang berulang, transparansi informasi, dan komitmen untuk melaksanakan peran dan tugas. Kepercayaan antar aktor dalam program penanganan stunting berawal dari pembagian peran yang jelas sejak rembuk stunting dilaksanakan. Setiap bagian menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Puskesmas menjadi pihak yang menangani intervensi terhadap anak yang sudah teridentifikasi stunting, umumnya

langsung dengan rujukan. Sementara itu, upaya pencegahan banyak dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui program seperti sedekah telur. Selain itu, kader di lapangan juga berperan penting sebagai garda terdepan. Kader melakukan pemantauan rutin, dan jika menemukan anak yang dicurigai stunting, segera diarahkan ke puskesmas. Dengan pembagian peran seperti ini, setiap pihak dapat bekerja sesuai kapasitasnya namun tetap saling melengkapi. Dengan adanya surat tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan, meningkatkan kepercayaan ini. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugasnya.

Kepercayaan juga terlihat dari kerja sama sehari-hari, di mana setiap pihak melakukan tugasnya sesuai kemampuan masing-masing, saling melengkapi, dan bergerak menuju tujuan yang sama. Keterlibatan kader sebagai ujung tombak lapangan sangat penting, karena kader berfungsi sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan pemangku kepentingan selain menyampaikan data dan laporan. Dengan adanya transparansi, tugas yang jelas, serta konsistensi dalam kerja sama, kepercayaan antar pihak menjadi semakin kuat. Kepercayaan ini menjadi dasar bagi kelanjutan program, karena hanya dengan dasar kepercayaan, kerja sama bisa terus berjalan efektif dalam mengurangi angka stunting.

3. *Commitment to the process* (Komitmen Terhadap Proses)

Dalam teori collaborative governance, komitmen para aktor dianggap menjadi elemen kunci yang memastikan keberhasilan kolaborasi. Menurut Ansell & Gash, (2008) komitmen ditunjukkan oleh keinginan para aktor untuk berpartisipasi secara terstruktur, memberikan sumber daya, dan mempertahankan kesepakatan bersama. Sebagai bentuk tanggung jawab, dibuat Mou, SK dan 16 produk hukum yang mengatur untuk menunjukkan komitmen setiap pihak terhadap kerja sama yang disepakati dalam program Jabar Zero New Stunting. Ini dibuat untuk mengurangi ketidakjelasan dalam pelaksanaan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

Sedangkan, terkait sumber daya pemerintah kota Bandung menyusunnya dalam rencana anggaran sebelum tahun pelaksanaan yang mengacu pada 8 aksi konvergensi. Delapan aksi konvergensi tersebut adalah, analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, Rembuk stunting, peraturan bupati/walikota percepatan penurunan stunting, pembinaan pelaku dan pemerintah desa, sistem manajemen stunting,

pengukuran & publikasi stunting, review kinerja tahunan.

Di sisi lain, komitmen juga terlihat dari kontribusi nyata para pelaku sesuai dengan peran masing-masing. Rumah sakit fokus pada pelayanan medis, puskesmas bertugas memvalidasi data dan memberikan layanan kesehatan dasar, kecamatan bertindak sebagai koordinator antar sektor, sementara kader bertugas langsung di masyarakat sebagai pendamping dan pengawas. Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya diambil oleh satu pihak, tetapi dilakukan secara bersama-sama.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Indikator ini juga membantu membangun kepercayaan dan komitmen antar aktor. Karena masing-masing pihak dapat memiliki program yang berbeda, kolaborasi cenderung rapuh jika tidak ada pemahaman bersama. Oleh karena itu, forum kolaboratif dibutuhkan karena memungkinkan setiap pihak untuk berbicara di tempat yang terbuka dan memungkinkan untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas yang dianggap realistis dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan mencapai kesepakatan ini, proses kolaboratif dapat mengarah pada pembelajaran bersama, inovasi kebijakan, dan hasil yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, DPPKB mecatat beberapa inovasi program tingkat kecamatan tahun 2024. Berikut beberapa inovasi program tersebut sebagai berikut:

a. Bursa Ting Ting, Buruan Sae Untuk Pencegahan Stunting. Berfokus pada penyediaan pangan sehat.
b. Gummasep, Gerakan Masyarakat Membangun Septic Tank. Berfokus pada membenahi sanitasi keluarga.
c. Ngabanting, Ngajaga balita Ulah Stunting. Dengan tujuan mendorong masyarakat untuk memprioritaskan tumbuh kembang anak.
d. Pembinaan Daring Kader Posyandu Rancasari. Sebagai upaya memperkuat kapasitas kader.
e. Omaba, Ojek makan Balita. Sebagai tempat untuk mendistribusikan makanan bergizi bagi balita.
f. Sifofo, Sistem Informasi Four Point O.. untuk meningkatkan data stunting.
g. Gerakan Sedekah 1 Telur (GES1T). sebagai upaya pemenuhan gizi harian.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 5, No. 2, Mei 2026, pp. 73-87
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i2.823

Dari uraian tersebut merupakan upaya nyata mencegah stunting. Setiap inovasi datang dari kesepakatan bersama, lalu diubah menjadi program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan program tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama, transparansi, serta tanggung jawab yang sama.

Berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan untuk meningkatkan pemahaman antar pihak. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang pencegahan dan penanganan stunting, langkah ini dianggap penting. Sebagai contoh, anak-anak di usia balita yang bersekolah di PAUD atau TK dapat dipantau status gizinya melalui pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada guru PAUD. Dengan demikian, guru tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan tetapi juga dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan stunting dan berkontribusi pada upaya pencegahan. Selain itu, kader kesehatan dilatih untuk memantau masyarakat dan mematuhi kebijakan Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan juga diberi pelatihan khusus untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan telah memiliki kemampuan dan memahami tanggung jawab dalam program percepatan penurunan stunting.

Perbedaan pendapat antar aktor adalah hal yang wajar dalam proses kerja sama. Ini juga terlihat ketika program pencegahan stunting dilaksanakan di Kecamatan Rancasari. Misalnya, puskesmas dan rumah sakit berbeda dalam mengidentifikasi kasus stunting. Untuk mengetahui apakah ada anak yang mengalami stunting, puskesmas umumnya menggunakan data dari aplikasi elektronik serta hasil pengecekan lapangan. Namun, terkadang anak-anak yang sebelumnya didaftarkan oleh puskesmas tidak menunjukkan tanda-tanda stunting saat diperiksa oleh dokter anak di rumah sakit, terutama RS Al-Islam.

Dengan demikian, acuan yang sama untuk menangani stunting digunakan oleh semua pihak. Pemahaman bersama diperkuat dengan adanya sosialisasi program, pembuatan modul, serta penggunaan data melalui aplikasi e-PPGBM (Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Kader juga berperan penting dalam menyampaikan informasi lapangan, sementara kecamatan menjadi fasilitator untuk menyamakan persepsi lintas sektor. Dengan demikian, meskipun setiap aktor memiliki cara kerja sesuai tugas dan fungsinya, arah tujuan tetap seragam, yaitu menurunkan

angka stunting dan mencegah kasus baru.

5. Dampak (*Intermediate Outcomes)*

Dampak dari kerja sama ini lebih dari sekedar komunikasi antar lembaga, menghasilkan rasa saling percaya, kesamaan arah, dan komitmen bersama, untuk mencapai tujuan akhir, yaitu perbaikan kebijakan dan penurunan angka stunting di Kecamatan Rancasari. Oleh karena itu, program pencegahan stunting di Kecamatan Rancasari telah mengalami perubahan besar dalam proses pelaksanaannya sejak dimulai. Kegiatan awalnya hanya terdiri dari koordinasi antarinstansi, tetapi kemudian berkembang menjadi kolaborasi lintas sektor yang lebih nyata. Saat ini bahkan telah mencapai tahap konvergensi, di mana setiap SKPD memiliki kemampuan untuk menjalankan program sesuai dengan tupoksi mereka sambil tetap bergerak menuju tujuan yang sama.

Kemajuan terlihat dalam monitoring dan evaluasi selain pola kerja. Monitoring dan evaluasi (monev), aksi ke-8 dari Kerangka 8 Aksi Konvergensi, menjadi komponen yang dilakukan secara teratur setiap tahun. Pada tahun berikutnya, program akan dievaluasi untuk menilai kemajuan, kelemahan, dan perbaikan. Sehingga perkembangan dapat dipantau secara jelas di tingkat kelurahan dan kecamatan, evaluasi ini dilakukan secara terukur dan melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari Bappeda Provinsi hingga Bapelitbang Kota Bandung.

Salah satu intermediate outcomes dari implementasi program pencegahan stunting di Kecamatan Rancasari adalah bahwa aktor telah memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Pemahaman dan data kesehatan yang lebih terintegrasi sekarang mendukung identifikasi kasus, yang sebelumnya lebih banyak didasarkan pada perkiraan atau tanda-tanda umum. Misalnya, terdapat hubungan yang lebih jelas antara stunting dan penyakit menular seperti TBC. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor telah membuat kemajuan dalam menyatukan data dan pemahaman.

Untuk mencegah stunting, diperlukan proses panjang dan pengawasan berkelanjutan, karena hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Edukasi dan sosialisasi menjadi bagian utama karena risiko stunting cukup tinggi. Stunting tidak dapat diselesaikan dalam beberapa hari, bulan, atau bahkan tahun. Meskipun anak menerima gizi yang baik dan memiliki tinggi badan yang sesuai, pertumbuhannya perllu dipantau,

karena jika asupan gizi terganggu atau anak sering mengalami infeksi, ada kemungkinan melambatnya pertumbuhan. Oleh karena itu, sejak awal, pemerintah menekankan program yang bersifat jangka panjang dengan fokus utama pada pencegahan.

Seiring berjalannya program, kemajuan dapat terlihat dari pola pikir dan pemahaman para aktor maupun masyarakat. Strategi saat ini lebih berfokus pada memastikan bahwa anak yang belum stunting terus berkembang, bukan pada anak yang sudah stunting. Meskipun demikian, anak stunting masih mendapatkan perawatan, seperti stimulasi perkembangan, untuk mencegah kondisinya menjadi lebih buruk. Selain itu, ada peningkatan dalam capaian salah satu contohnya adalah jumlah kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan dengan cukup baik, hasil penanganan stunting masih belum jelas. Pertumbuhan anak tidak dapat meningkat dengan cepat karena banyak faktor. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan instruksi mengenai tindakan pencegahan, beberapa narasumber mengatakan bahwa fokus program lebih pada mencegah kasus baru daripada mengubah kondisi anak yang sudah stunting. Meskipun program seperti pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, dan pemantauan ibu hamil dengan risiko kekurangan energi kronis (KEK) telah dilaksanakan secara teratur, masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan perubahan yang signifikan pada masalah anak stunting.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* Dalam *Zero New* Stunting Di Kecamatan Rancasari, telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun hingga kini terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Kolaborasi tidak hanya terwujud melalui koordinasi formal dalam forum rembuk stunting, SK TPPS, maupun MoU, tetapi juga berlangsung secara nyata di lapangan melalui intervensi dan pencegahan yang dilakukan sesuai peran masing-masing aktor. Sumber daya tidak hanya mencakup orang, tetapi juga obyek dan benda kebutuhan lainnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung berperan sebagai penanggung jawab teknis, Dinas kesehatan berperan sebagai pengarah kebijakan, kecamatan memegang peran kordinatif dengan memfasilitasi komunikasi lintas sektor, puskesmas menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan verifikasi data, pemantauan gizi, dan intervensi kesehatan. Kader posyandu dan TPPK bertugas dalam pencegahan jangka panjang mendampingi keluarga, melaporkan data balita, serta memberikan edukasi, kepada calon pengantin, remaja, dan ibu hamil. sementara LSM memperkuat dukungan layanan spesialis, logistik, maupun inovasi program. Namun, hingga kini masih terdapat ketimpangan dalam kontribusi sumber daya karena tidak semua pihak mampu memberikan dukungan dengan jumlah yang sama.

Pelaksanaan Program Jabar Zero New Stunting menunjukkan bahwa dialog tatap muka telah diterapkan melalui forum lintas sektor seperti rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), rembuk stunting, dan kegiatan pemantauan di lapangan. Forum ini digunakan sebagai sarana penbagi para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, menyamakan persepsi, dan memecahkan masalah. Meskipun dialog tatap muka cukup sering, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan partisipasi dari seluruh pihak, terutama dari sektor LSM dan masyarakat. Secara keseluruhan, indikator dialog tatap muka telah bekerja dengan baik sebagai dasar bagi kerja sama lintas sektor.

Tingkat kepercayaan antar-aktor kolaborasi di Kecamatan Rancasari terbentuk melalui interaksi berulang dalam berbagai kegiatan bersama. Keterlibatan kader sebagai ujung tombak lapangan sangat penting, karena kader berfungsi sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan pemangku kepentingan selain menyampaikan data dan laporan. Dengan adanya transparansi, tugas yang jelas, serta konsistensi dalam kerja sama, kepercayaan antar pihak menjadi semakin kuat.

Komitmen semua pihak dalam menjalankan program terlihat dari peran setiap lembaga sesuai tugas masing-masing. DPPKB Kota Bandung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebijakan, Dinas kesehatan berperan sebagai pengarah kebijakan, Kecamatan Rancasari bertugas sebagai pihak yang mengkoordinasikan antar sektor, sedangkan Puskesmas Cipamokolan dan Derwati menjalankan tugas teknis di bidang kesehatan dan memverifikasi data. Kader Posyandu dan TPK menjadi pihak yang langsung melaksanakan di masyarakat,

sedangkan LSM Cita Sehat Foundation memberikan dukungan melalui intervensi gizi dan edukasi. Meski demikian, komitmen ini masih perlu diperkuat dengan meningkatkan kemampuan dan kehadiran semua pihak dalam forum koordinasi, agar kerja sama berjalan lebih baik.

Para aktor dalam program Jabar Zero New Stunting mengerti bahwa tujuan utama kerja sama mereka adalah untuk mencegah munculnya kasus stunting baru melalui intervensi gizi, perawatan kesehatan, dan pendampingan keluarga. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian tanggung jawab. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan tujuan yang sama, diperlukan penguatan mekanisme komunikasi lintas sektor.

Kolaborasi antar berbagai sektor dalam program Jabar Zero New Stunting di Kecamatan Rancasari telah memberikan dampak yang baik, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi seimbang dan pemantauan pertumbuhan anak. Selain itu, kerja sama yang baik antar pelaku juga membantu meningkatkan keakuratan data sasaran serta keberhasilan tindakan intervensi gizi di lapangan. Meskipun hasil jangka panjang seperti penurunan angka stunting masih membutuhkan waktu, praktik pengelolaan kolaboratif yang berjalan telah menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga kelanjutan program dan dapat diterapkan di daerah lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance di Kecamatan Rancasari telah berjalan sesuai dengan prinsip Ansell & Gash (2008) dengan indikator teori dialog tatap muka (Face to Face Dialog), membangun kepercayaan (Trust Building), Komitmen (Comitment), pemahaman bersama (Share Understanding), Dampak (Intermediate Outcome). Namun, terdapat ketimpangan kapasitas dalam penyamaan persepsi yang perlu diperhatikan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan lembaga swadaya masyarakat belum disusun dalam bentuk Perjanjian Kerja (MoU). Hal ini disebabkan karena sebagian besar bantuan yang diberikan oleh LSM masih bersifat sukarela, berbasis proyek, dan bisa berubah mengikuti ketersediaan sumber daya yang mereka miliki.

Daftar Rujukan

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Creswell, J. W. (2023). Research Design: Penelitian Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran.

Daerah, S. P., Mewujudkan, D., Zero, J., Stunting, N. E. W., & Bandung, D. I. K. (2024). J u r n a l p r a x i s i d e a l i s. 01(01).

Fitriani, N. (2023). Data terbaru! Prevalensi stunting di Jabar menurun 4,3%, pencapaian target WHO semakin dekat. OPen Data Jabar. https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/data-terbaru-prevalensi-stunting-di-jabar-menurun-43-pencapaian-target-who-semakin-dekat?utm_source=chatgpt.com